

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan utama suatu negara melaksanakan pembangunan ekonomi adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Dalam proses pembangunan ekonomi banyak dilibatkan berbagai perubahan baik dari segi sosial maupun ekonomi masyarakatnya, diantaranya seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan (disparitas) serta penurunan tingkat pengangguran, dikarenakan banyak melibatkan berbagai perubahan, sehingga pembangunan ekonomi dikatakan bersifat multidimensional (Todaro dan Smith, 2015).

Sukirno (2017) mendefinisikan Pembangunan ekonomi sebagai suatu keadaan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perkembangan berbagai aspek dalam perekonomian, yakni perkembangan pendidikan, keahlian dan terjadinya perbaikan teknologi. Dalam pembangunan ekonomi terjadi interaksi dari berbagai input pembangunan yakni input Sumber daya alam (SDA), Sumber daya manusia (SDM), modal dan teknologi, diantara input pembangunan tersebut peran sumber daya manusia (SDM) sangat penting karena tidak hanya berperan sebagai input atau modal pembangunan, melainkan turut serta dalam menentukan dinamika terlaksananya pembangunan, baik perannya sebagai tenaga kerja produktif atau sebagai konsumen yang menikmati hasil pembangunan.

Terciptanya kesempatan kerja yang luas merupakan indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja diperlukan dalam menyerap angkatan kerja yang jumlahnya terus meningkat. Jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, besarnya jumlah penduduk tidak serta merta dianggap sebagai beban pembangunan, dilain sisi akan berdampak positif apabila mereka mampu menjadi pelopor pembangunan, sehingga akan menghasilkan perekonomian yang cepat berkembang, sementara dianggap beban ketika kesempatan kerja yang dihasilkan tidak cukup untuk menampung besarnya jumlah angkatan kerja yang dihasilkan

dari besarnya jumlah penduduk, alhasil munculnya masalah pengangguran tidak bisa dihindari, pengangguran yang semakin parah dapat menjadi akar dari permasalahan kemiskinan, yang pada gilirannya juga menyebabkan masalah lain yakni peningkatan kriminalitas dan menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2013).

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ekonom klasik, yakni Robert Malthus dan David Ricardo menyatakan bahwa negara maju dan berkembang mengalami dampak yang berbeda dari peningkatan jumlah penduduk dalam hal pertumbuhan ekonominya, peningkatan kuantitas penduduk untuk negara maju justru membantu pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh input modal yang melimpah, seperti halnya terjadi pada abad 18 di Eropa Barat, dimana peningkatan penduduk yang begitu cepat dapat membantu proses industrialisasi. Namun, peningkatan jumlah penduduk memiliki dampak negatif bagi negara berkembang karena jumlah modal yang dimiliki belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk (Halfiza & Talbani, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dibuktikan dari data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan bahwa jumlah penduduk Indonesia tahun 2021 sebesar 273,87 juta jiwa, setiap tahun jumlah penduduk Indonesia menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pertumbuhan penduduk selalu dibarengi dengan peningkatan angkatan kerja yang memasuki usia produktif, kondisi tersebut menuntut adanya ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja baru (Windayana & Darsana, 2020).

Nasution (2015) menyebutkan bahwa jika jumlah angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan tidak seimbang tentu akan menimbulkan peningkatan pengangguran, hal ini terjadi karena ketidakmampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap semua angkatan kerja yang ada. Penyerapan tenaga kerja adalah isu krusial dalam pembangunan daerah, karena dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan, ini berarti penyerapan tenaga kerja berperan penting dalam mendukung kesuksesan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, situasi penyerapan tenaga kerja juga bisa menjadi cerminan dari kondisi

ekonomi, sosial, dan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah pada periode tertentu (Ganie, 2017).

Tabel 1.1 Total Angkatan Kerja, Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran Indonesia Tahun 2011-2021

Tahun	Angkatan kerja (Juta Jiwa)	Bekerja		Pengangguran	
		Juta Jiwa	%	Juta Jiwa	%
2011	116.10	107.45	92.52	8.69	7.48
2012	119.85	112.50	93.87	7.34	6.13
2013	120.17	112.76	93.83	7.41	6.17
2014	121.87	114.63	94.06	7.24	5.94
2015	122.38	114.82	93.82	7.56	6.18
2016	125.44	118.41	94.39	7.03	5.61
2017	128.06	121.02	94.50	7.04	5.50
2018	131.01	124.01	94.66	7.00	5.34
2019	133.56	126.51	94.72	7.05	5.28
2020	138.22	128.45	92.93	9.77	7.07
2021	140.15	131.05	93.51	9.10	6.49

Sumber: BPS, *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2011-2021*(2022)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2021 jumlah angkatan kerja Indonesia konsisten meningkat, selama 11 tahun angkatan kerja Indonesia meningkat sebesar 24.05 juta jiwa, berbeda dengan penyerapan tenaga kerja yang tampak berfluktuatif. Kenaikan angkatan kerja akan berdampak baik jika dapat diserap secara maksimal oleh lapangan kerja yang tersedia, dan akan menimbulkan masalah pengangguran apabila tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional masih tinggi, yakni lebih dari 5 persen. Pada tahun 2014, TPT pernah mencapai target yang ditetapkan oleh RPJMN 2010-2014, yaitu mengurangi pengangguran menjadi 5 sampai 6 persen. Namun, dalam lima tahun berikutnya, TPT belum mencapai sasaran RPJMN 2015-2019, yang menargetkan penurunan TPT menjadi 4 sampai 5 persen pada tahun 2019. Setahun setelahnya yakni tahun 2020, TPT mengalami kenaikan yang drastis mencapai 7,07 persen, dimana naik sebesar 1,79 persen dari TPT tahun 2019 yang merupakan tahun dengan TPT terendah dalam 11 tahun terakhir yaitu sebesar 5,28 persen. Pada tahun 2021, TPT sedikit menurun menjadi 6,49 persen, namun angka tersebut tetap jauh dari sasaran RPJMN tahun 2020-2024,

di mana pemerintah berharap TPT turun menjadi sebesar 4 hingga 4,6 persen pada tahun 2024.

TPT yang tinggi mencerminkan masih banyak angkatan kerja yang belum diserap dalam aktivitas perekonomian, dapat dilihat dari persentase penyerapan tenaga kerja pada tahun 2020 hingga 2021 cenderung menurun dibandingkan pada 6 tahun sebelumnya, Penurunan ini terjadi karena penanaman modal dalam negeri yang melambat, kehadiran Covid-19 juga menyebabkan disrupsi pada situasi ketenagakerjaan atau kondisi dimana ketenagakerjaan tidak berjalan seperti biasanya (Hasanah, 2022).

Pada tahun terjadinya Covid-19, tidak sedikit perusahaan di berbagai sektor ekonomi mengalami krisis, terutama yang berukuran kecil. Risiko besar terletak pada jutaan pekerja yang mungkin kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan karena menghadapi PHK (Syahrial, 2020).

Permasalahan masih berfluktuasinya penyerapan tenaga kerja dan masih tingginya angka pengangguran pada tingkat provinsi di Indonesia juga belum sepenuhnya berhasil, banyak provinsi di Indonesia mengalami hal serupa, salah satunya Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2011-2021

Provinsi	TPT (%)											Rata-rata TPT (%)
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Aceh	7.43	9.06	8.34	9.02	9.93	7.57	6.57	6.34	6.17	6.59	6.30	7.57
Sumatera Utara	6.37	6.28	6.09	6.23	6.71	5.84	5.60	5.55	5.39	6.91	6.33	6.12
Sumatera Barat	6.45	6.65	6.39	6.50	6.89	5.09	5.58	5.56	5.38	6.88	6.52	6.17
Riau	5.32	4.37	4.19	6.56	7.83	7.43	6.22	5.98	5.76	6.32	4.42	5.85
Jambi	4.02	3.20	2.89	5.08	4.34	4.00	3.87	3.73	4.06	5.13	5.09	4.13
Sumatera Selatan	5.77	5.66	5.41	4.96	6.07	4.31	4.39	4.27	4.53	5.51	4.98	5.08
Bengkulu	2.37	3.62	2.10	3.47	4.91	3.30	3.74	3.35	3.26	4.07	3.65	3.44
Lampung	5.78	5.20	5.07	4.79	5.14	4.62	4.33	4.04	4.03	4.67	4.69	4.76
Kep. Bangka Belitung	3.61	3.43	3.22	5.14	6.29	2.60	3.78	3.61	3.58	5.25	5.03	4.14
Kep. Riau	7.80	5.08	6.05	6.69	6.20	7.69	7.16	8.04	7.50	10.34	9.91	7.50

Sumber : BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Tahun 2011-2021(2022), diolah

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2021 TPT seluruh Provinsi di Pulau Sumatera juga berfluktuasi, dengan kenaikan terbesar terjadi di tahun 2020, yakni lebih dari 1 persen. Adapun TPT Provinsi Sumatera Barat pada tahun terakhir berada pada urutan kedua tertinggi setelah Kepulauan Riau yakni sebesar 6.28 persen, jika dirata-ratakan selama 11 tahun terakhir TPT Sumatera Barat sebesar 6.17, berada pada urutan ketiga tertinggi setelah Provinsi Aceh dan Kepulauan Riau.

Tabel 1.3 Total Angkatan Kerja dan Total Penduduk Bekerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011- 2021

Tahun	Angkatan kerja (jiwa)	Bekerja	
		Jiwa	%
2011	2.213.513	2.070.725	93.55
2012	2.179.829	2.037.642	93.35
2013	2.156.385	2.005.625	93.61
2014	2.406.659	2.250.370	93.50
2015	2.346.163	2.184.599	93.11
2016	2.473.814	2.347.911	94.91
2017	2.483.675	2.344.972	94.42
2018	2.552.130	2.410.450	94.45
2019	2.684.389	2.540.040	94.62
2020	2.772.133	2.581.524	93.12
2021	2.761.392	2.581.444	93.67

Sumber : BPS, Sumatera Barat dalam Angka 2012-2022(2022)

Pada Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat tidak konsisten, namun secara keseluruhan menunjukkan peningkatan, penurunan pernah terjadi pada tahun 2011 hingga 2013, selama dua tahun tersebut jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 57,128 jiwa, kemudian delapan tahun setelahnya jumlah angkatan kerja konsisten meningkat, kecuali tahun 2021 dimana merupakan salah satu tahun terdampak Covid-19, jumlah angkatan kerja kembali sedikit turun sebesar 10.741 jiwa dari tahun sebelumnya. Adapun penyerapan tenaga kerja juga tidak konsisten meningkat, dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 94.91 persen, terendah tahun 2015 sebesar 93.11 persen. Selain itu kemunculan Covid-19 juga menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja sebesar 1.50 persen di tahun 2020 yaitu dari 94.62 persen di tahun 2019 menjadi 93.12 persen,

dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 93.67 persen, hal ini dikarenakan kondisi perekonomian mulai berangsur membaik pada tahun kedua terjadinya Covid-19.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengangguran di Provinsi Sumatera Barat masih tinggi sehingga penyerapan tenaga kerjanya belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja guna mengimbangi penawaran tenaga kerja yang tinggi akibat dari penambahan angkatan kerja usia produktif yang mulai memasuki pasar tenaga kerja (Lokiman et al., 2014). Sebagaimana pernyataan Kuncoro (2012) bahwa masalah terserapnya tenaga kerja (*pro-job*) merupakan salah satu dari tiga program yang harus diperhatikan pemerintah selain peningkatan pertumbuhan (*pro-growth*) dan pengentasan masalah kemiskinan (*pro-poor*).

Ada beberapa faktor sosial dan ekonomi yang memiliki peran penting dalam menentukan sejauh mana tenaga kerja diserap, Sumarsono (2009) berpendapat bahwa tenaga kerja yang diserap dipengaruhi oleh nilai produksi, investasi dan lain-lain, kemudian menurut Endri (2010) pendidikan yang dilaksanakan seseorang juga berpengaruh terhadap kemudahan mereka dalam memperoleh pekerjaan di masa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merepresentasikan nilai tambah produksi dalam jangka waktu tertentu, peningkatan PDRB dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Feriyanto, 2014), pernyataan ini diperkuat oleh Hukum Okun yang mengaitkan antara peningkatan PDB atau dalam lingkup regional disebut PDRB, dimana jika PDRB meningkat sebesar 2 persen akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 1 persen dengan turunnya pengangguran maka akan mencerminkan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja (Meilasari, 2020).

**Tabel 1.4 Nilai PDRB ADHK 2010 dan Laju Pertumbuhan PDRB
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2021**

Tahun	PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2011	111.679.492,97	6.34
2012	118.724.424,67	6.31
2013	125.940.634,27	6.08
2014	133.340.836,44	5.88
2015	140.719.474,19	5.53
2016	148.134.243,89	5.27
2017	155.984.364,13	5.30
2018	163.996.189,04	5.14
2019	172.205.571,30	5.01
2020	169.426.614,10	-1.61
2021	175.000.501,95	3.29

Sumber : BPS Sumatera Barat (2022)

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui besaran PDRB ADHK tahun dasar 2010 Provinsi Sumatera Barat pada 11 tahun terakhir meningkat kecuali tahun 2020, sebagai tahun yang paling terdampak Covid-19 menyebabkan perekonomian tingkat provinsi ikut terpuruk, keadaan ini terjadi karena dikeluarkannya berbagai kebijakan penanggulangan Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai macam lapangan usaha. PDRB yang biasanya meningkat konsisten justru turun dari 172.2 triliun rupiah menjadi 169.4 triliun rupiah.

Jika dilihat dari perspektif pertumbuhannya PDRB Provinsi Sumatera Barat 11 tahun terakhir terlihat mengalami perlambatan pertumbuhan, perlambatan mulai terjadi pada tahun 2015 dimana pertumbuhan PDRB turun sebesar 0.26 persen dari 5.53 persen menjadi sebesar 5.27 persen, penurunan terparah terjadi pada tahun 2020 dimana PDRB sempat mengalami kontraksi sebesar -1.61 persen. Kemudian, pada tahun 2021, PDRB berhasil memperlihatkan perbaikan dengan kenaikan sebesar 1.68 persen menjadi 3.29 persen, hal ini dikarenakan mulai normalnya aktivitas perekonomian masyarakat setelah penurunan level PPKM, kondisi pandemi Covid-19 tidak lagi menghalangi aktivitas masyarakat, seiring dengan terjadinya penurunan kasus Covid-19 secara signifikan dan gencarnya vaksinasi yang dilakukan.

Perlambatan pertumbuhan PDRB tentunya akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan asumsi bahwa peningkatan PDRB akan menyebabkan peningkatan nilai tambah output produksi dalam seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut, ketika nilai produksi meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan bertambah, sehingga akan menurunkan tingkat pengangguran (Arsyad, 2000), pendapat ini sejalan dengan hasil penelitian Dian (2022) bahwa PDRB menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 35 provinsi di Indonesia, namun hasil berbeda ditemukan oleh Hasanah (2022) serta Ramdani et. al (2021) bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, pendidikan juga dapat mempengaruhi kemudahan seseorang diserap dalam pasar tenaga kerja. Suparmoko (2014) berpendapat bahwa dari sekian banyaknya faktor produksi, pendidikan merupakan faktor yang paling besar mempengaruhi produktivitas perusahaan. Hal ini didukung oleh teori *human capital* yang mengasumsikan beberapa keuntungan dalam mengenyam pendidikan yang tinggi, seperti peningkatan kesejahteraan, efisiensi produksi, berkesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan potensi peningkatan pendapatan (BPS, 2020).

Kualitas pendidikan di suatu daerah dapat tercermin dari rata-rata tahun lama sekolah yang ditempuh oleh penduduknya. Rata-rata tahun lama sekolah penduduk Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 hingga 2021 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan yang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,92 tahun meningkat sebesar 0,16 tahun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,76 tahun. Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah Sumatera Barat sudah menyentuh angka 9,07 tahun, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk Sumatera Barat sudah menempuh kegiatan wajib belajar selama 9 tahun atau hingga jenjang SMP.

Pendidikan merupakan investasi yang dimiliki oleh angkatan kerja, karena melalui pendidikan, angkatan kerja dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan, bahkan dapat berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja di masa depan. Beberapa penelitian tentang pengaruh pendidikan bagi penyerapan tenaga kerja sebelumnya sudah pernah dilakukan namun dihasilkan kesimpulan yang berbeda, penelitian Febrianty dan Indri (2021) menemukan pengaruh positif dan signifikan pendidikan bagi penyerapan tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta, sementara itu penelitian Ganie (2017) ditemukan bahwa pendidikan juga berpengaruh signifikan namun berkoefisien negatif bagi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kegiatan investasi juga menunjukkan adanya pengaruh bagi penyerapan tenaga kerja, karena investasi memegang peran penting sebagai elemen kunci dalam faktor produksi yang dapat meningkatkan kapasitas serta jumlah perusahaan. Kenaikan investasi secara signifikan dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi, baik dari pasar dalam negeri maupun luar negeri. Tingkat permintaan tersebut berperan dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan dalam proses produksi (Dharma & Djohan, 2015).

Oleh karena itu iklim investasi yang kondusif sangat diperlukan guna menunjang kegiatan investasi yang masuk ke suatu daerah. Sumatera Barat termasuk provinsi yang memiliki kekayaan akan sumber daya alamnya, selain itu Sumatera Barat secara geografis iklim, darat dan lautan juga cocok difungsikan sebagai kegiatan produksi berbagai sektor baik pertanian, perikanan maupun industry. Oleh karena itu, dengan adanya peluang tersebut, sudah seharusnya dapat menarik lebih banyak investor untuk menginvestasikan modal mereka. Berikut nilai investasi PMDN dan PMA Provinsi Sumatera Barat dalam 11 tahun terakhir:

**Tabel 1.5 Investasi Swasta Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2021**

Tahun	PMDN (Milyar Rupiah)	PMA (Juta US\$)
2011	1.026,2	22,9
2012	885,3	75,0
2013	677,8	91,4
2014	421,1	112,1
2015	1.552,5	57,1
2016	4.864,2	79,3
2017	3795,6	194,4
2018	2.309,4	180,8
2019	3.026,6	157,1
2020	3.106,1	125,6
2021	4.183,7	67,0

Sumber :NSWI (2022)

Berdasarkan tabel 1.5 diketahui bahwa dalam 11 tahun terakhir realisasi investasi swasta kategori PMDN mengalami kenaikan yang tidak konsisten, realisasi PMDN tertinggi pada tahun 2016 sebesar 4.864.2 milyar rupiah, dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 421.1 milyar rupiah. Berbanding terbalik dengan realisasi PMA yang justru cenderung turun, selama 11 tahun terakhir kenaikan PMA hanya terjadi dalam 2 tahun yaitu tahun 2014 dan 2017, tahun 2014 menjadi kenaikan tertinggi dimana naik sebesar 20.7 juta dolar US menjadi 112.1 juta dolar US.

Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi dari berbagai input produksi serta memiliki sektor perekonomian yang beragam, hal tersebut belum mampu mendorong investasi swasta yang masuk, pada kenyataannya jumlah investasi swasta yang masuk masih tergolong minim dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi skema penanaman modal agar potensi input produksi yang dimiliki dapat dimanfaatkan, sehingga investasi yang terealisasi dapat meningkat sekaligus memperluas kesempatan kerja, asumsi ini didukung oleh penelitian Halfiza dan Farlian (2018) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan investasi bagi penyerapan tenaga kerja di Aceh, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Banurea (2022) yaitu investasi tidak signifikan dalam mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Kota Medan.

Berdasarkan latar belakang ditarik kesimpulan bahwasanya penyerapan tenaga kerja yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat belum optimal, dibuktikan dari masih tingginya tingkat pengangguran atau adanya disparitas antara ketersediaan angkatan kerja dan penduduk bekerja. Terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menentukan penyerapan tenaga kerja, yakni PDRB, pendidikan, total investasi swasta, selain itu terjadinya pandemi Covid-19 juga turut memberikan dampak bagi bidang perekonomian salah satunya pada bidang ketenagakerjaan, maka peneliti menambahkan variabel yakni *dummy* Covid-19 guna melihat perbedaan kondisi tenaga kerja yang diserap sebelum dan saat terjadinya Covid-19. Merujuk pada pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik meneliti permasalahan dengan judul **“Faktor Penentu Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menilik pemaparan latar belakang yang disajikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh PDRB, pendidikan dan total investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2011- 2021?
2. Bagaimanakah dampak *dummy* Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, berikut diuraikan tujuan penulisan penelitian ini :

1. Menganalisis pengaruh PDRB, pendidikan, total investasi swasta terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2011-2021.

2. Mengkaji dampak *dummy* Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021 terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terkait dengan topik yang dibahas yakni di bidang ketenagakerjaan lebih khususnya membahas terkait faktor penentu penyerapan tenaga kerja.

2. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada pihak akademis berupa informasi atau tambahan pengetahuan terkait faktor penentu penyerapan tenaga kerja.

3. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan berperan sebagai sumber atau referensi yang bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti topik serupa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berbasiskan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis akan membatasi jumlah variabel yang akan diuji sebagai faktor yang sekiranya menjadi penentu penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat yakni PDRB ADHK tahun dasar 2010, pendidikan, total investasi swasta, selain itu juga digunakan variabel tambahan yakni *dummy* Covid-19 guna melihat dampak Covid-19 terhadap penyerapan tenaga kerja. Adapun lokasi daerah yang akan diteliti ialah 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat, untuk data penelitian yang digunakan berupa data sekunder selama kurun waktu 11 tahun yakni dari 2011 hingga 2021 yang diperoleh dari *website* maupun publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan *National Single Window For Investment* (NSWi).

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian BAB I berisi gambaran penelitian secara umum, yang mencakup penjelasan latar belakang, identifikasi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bagian BAB II ini memuat berbagai konsep variabel dan teori rujukan yang berhubungan dengan variabel diteliti, hubungan antar variabel, penelitian relevan yang dijadikan acuan, kerangka analisis serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian BAB III mengkaji metode yang dipakai, mencakup jenis penelitian yang dibuat, jenis data serta sumbernya, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan yang terakhir definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian BAB V mengkaji temuan empiris dari pengolahan data yang dihasilkan dari penelitian kemudian hasil tersebut diuraikan atau dianalisis secara lengkap, dilengkapi juga oleh implikasi dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian BAB VI mengkaji kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan, saran yang berhubungan dengan hasil penelitian serta keterbatasan dari penelitian.

